

OPTIMALISASI PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BPKAD KOTA MAKASSAR

Putri Rumpati Bangsawan
NPP. 31.0840

Asdaf Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Studi Keuangan Publik

Email : putrirumpati22@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Riswati S.Pd., M.Si

ABSTRACT

The Problem (GAP): Makassar City's regional income was recorded in the 2019-2022 period, generally fluctuating from budget targets and realization. This is influenced by various factors, one of which is the management of regional property. **Purpose:** There are three objectives of the research carried out, including, to analyze and determine the optimization of the use of Regional Property in increasing Original Regional Income in BPKAD Makassar City, To identify factors inhibiting the optimization of the use of Regional Property in increasing Original Regional Income in BPKAD Makassar City, To describe efforts made to optimize the use of Regional Property in increasing Original Regional Income in BPKAD Makassar City. **Method:** This research uses a descriptive qualitative research method with an inductive approach and then uses Siregar's optimization theory which has 3 dimensions, including asset identification, asset utilization analysis, asset management information system (SIMA). Then the data used is primary data and secondary data collected using interview and observation techniques, then from the data obtained the researcher analyzes the data according to starting from data reduction, data presentation and drawing conclusions. **Result:** The asset identification process carried out by the Makassar City Regional Financial and Asset Management Agency has stages that are in accordance with the theory put forward by Siregar regarding asset identification. Analysis of optimizing asset utilization at the Makassar City Regional Financial and Asset Management Agency, separating operational and non-operational assets and carrying out asset optimization processes both through leasing and selling assets. The use of an asset management information system (SIMA) in an agency will facilitate asset management so that asset management can run smoothly from planning to monitoring and controlling assets. There are two factors that are obstacles that prevent Regional Financial and Asset Management Bodies from being able to carry out optimization properly. Using the SIMBAKDA application is an effort made by the Makassar City Regional Financial and Asset Management Agency to cover existing deficiencies in the organization, namely the lack of Human Resources and the lack of strategic location of some of the assets it owns. **Conclusion:** It is concluded that Optimizing the Use of Regional Property in Increasing Original Regional Income in Makassar City is still not optimal. There are two factors inhibiting the optimization of the use of Regional Property in increasing Regional Original Income in Makassar City, namely limited human resources and non-strategic location of assets. The Regional Financial and Asset Management Agency's efforts in optimizing regional property to increase regional original income consist of creating an Asset Management Information System (SIMA) called the Makassar Regional Property Management Information System (SIMBAKDA) which is useful for facilitating performance in asset administration and improving assets that are still damaged and strive for special attention to be given to assets that have less strategic locations in their optimization.

Keywords: Optimization, Regional Property, Regional Original Income

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Pendapatan daerah Kota Makassar tercatat pada periode tahun 2019-2022 secara umum terjadi fluktuatif dari target anggaran serta realisasi. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya ialah pengelolaan barang milik daerahnya. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian yang dilakukan ada tiga yang diantaranya, untuk menganalisis dan mengetahui optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di BPKAD Kota Makassar, Untuk mengidentifikasi faktor penghambat optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di BPKAD Kota Makassar, Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan dalam optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di BPKAD Kota Makassar. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif kemudian menggunakan teori optimalisasi oleh Siregar yang memiliki 3 dimensi yang diantaranya Identifikasi aset, analisis pemanfaatan aset, sistem informasi manajemen aset (SIMA). Kemudian data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dan observasi kemudian dari data yang diperoleh peneliti menganalisis datanya sesuai dengan mulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Proses identifikasi aset yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar memiliki tahapan yang sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Siregar terkait identifikasi aset. Analisis optimalisasi pemanfaatan aset di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar melakukan pemilahan aset operasional dan non operasional serta melakukan proses pengoptimalan aset baik melalui sewa dan penjualan aset. penggunaan sistem informasi manajemen aset (SIMA) dalam suatu instansi akan memudahkan pengelolaan aset sehingga pengelolaan aset dapat berjalan dengan lancar mulai dari perencanaan hingga pemantauan dan pengendalian aset. Terdapat dua faktor yang menjadi penghambat yang menjadikan Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah masih belum bisa melaksanakan optimalisasi dengan baik. Menggunakan aplikasi SIMBAKDA merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar dalam menutupi kekurangan yang ada di organisasi yaitu dengan kekurangan Sumber Daya Manusia dan kurang strategisnya lokasi dari beberapa aset yang dimiliki. **Kesimpulan:** Disimpulkan bahwa Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar masih belum optimal. Faktor penghambat optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar terdapat dua faktor yaitu sumber daya manusia yang terbatas dan lokasi aset yang tidak strategis. upaya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam Optimalisasi barang Milik Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Membuat suatu Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) yang bernama Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBAKDA) Makassar yang berguna untuk memudahkan kinerja dalam penatausahaan aset serta Memperbaiki aset yang masih rusak serta mengupayakan adanya perhatian khusus yang diberikan untuk aset yang memiliki lokasi yang kurang strategis dalam optimalisasinya.

Kata Kunci: Optimalisasi, Barang Milik Daerah, Pendapatan Asli Daerah

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu hal yang tidak dapat dilepaskan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, keuangan daerah membutuhkan sumber pendapatan utama yang wajib dimiliki pemerintah daerah untuk membiayai segala pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Bagian I Nomor 7 Tentang Keuangan Daerah dituliskan bahwa untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, daerah wajib memiliki sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat didaerahnya.

Sumber keuangan daerah atau sumber pendapatan daerah yang dituliskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 Ayat 1 terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya, dituliskan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 285 Ayat 1, pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berhasil dan mandirinya suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah salah satu indikatornya ialah dengan dilakukan pemanfaatan secara optimal oleh masing-masing pemerintah daerah terhadap Pendapatan Asli Daerahnya sebagai sumber pendapatan utama daerah karena tidak mengandalkan dana perimbangan dari pemerintah pusat saja. Tetapi, hingga saat ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan utama masih sulit diandalkan oleh masing-masing pemerintah daerah. Pemerintah daerah masih kurang mampu mengelola dan menggali potensi pada sumber Pendapatan Asli Daerah secara maksimal. Hal ini dikarenakan masing-masing pemerintah daerah belum menyadari potensi sumber pendapatan didaerahnya dan belum menjadikan sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai prioritas utama pendapatan daerah.

Barang Milik Daerah merupakan sumber daya milik daerah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pemerintahan yang ada didaerah diminta oleh Kementerian Dalam Negeri untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerahnya agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni, menyebutkan “Pemanfaatan Barang Milik Daerah secara optimal dapat memajukan Pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan masyarakat.”

Pemerintah daerah tidak dapat dikatakan berhasil dan mandiri dalam menjalankan urusan pemerintahan daerahnya apabila masih belum mampu mengoptimalkan pengelolaan aset atau Barang Milik Daerah. Hal tersebut membebani anggaran pemerintah daerah dalam pemeliharaan aset tersebut. Selain itu, apabila tidak dioptimalkan pemanfaatannya secara maksimal maka akan menurunkan nilai pemanfaatan dari aset tersebut seiring berjalannya waktu.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar sebagai pelaksana yang bertugas mengelola keuangan dan aset daerah Kota Makassar menuliskan dalam rencana

strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar bahwa sekarang masih banyak didapatkan Pemerintah Kota Makassar memiliki aset yang belum mempunyai bukti kepemilikan sertifikat, masih banyak juga terdapat fasilitas umum dan fasilitas sosial yang menjadi hak Pemerintah Kota Makassar akan tetapi belum diserahkan dari pengembang, dan masih ada aset Pemerintah yang dikuasi oleh pihak yang tidak memiliki hak, sehingga mengakibatkan belum optimalnya pemanfaatan dan pemeliharaan aset yang dimaksud.

Pendapatan daerah Kota Makassar tercatat pada periode tahun 2019-2022 secara umum terjadi fluktuatif dari target anggaran serta realisasi. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya ialah pengelolaan barang milik daerahnya. Tanah dan bangunan yang berada dibawah pengelola barang merupakan aset daerah yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya untuk menambah Pendapatan Asli Daerah, sedangkan aset yang bisa dipakai untuk keperluan tugas dan fungsi (tusi) ialah aset yang berada dibawah pengguna barang. Maka dari itu, penulis melaksanakan penelitian tentang pemanfaatan Barang Milik Daerah Kota Makassar yang berada dalam naungan pengelola barang.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang peneliti laksanakan terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu, adapun penelitian terdahulu yang peneliti ambil diantaranya adalah yang pertama *Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship* Vol. 5 No. 2 oleh Feijar dan Budi Priyono Tahun 2023 dengan judul “PENGELOLAAN ASET DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KOTA DEPOK” (Feijar dan Budi Priyono, 2023) yang menemukan bahwa masih kurangnya tindakan-tindakan yang tegas terhadap masyarakat yang tidak patuh dalam penggunaan aset daerah. Pada pemanfaatan aset daerah dari sisi kebijakan yang ditetapkan sudah diatur dengan kebijakan yang sangat baik tetapi melihat kondisi pengelolaan aset daerah saat ini, pemanfaatan aset berupa tanah dan bangunan berupa sewa masih kurangnya peningkatan dan pengembangan strategis yang baik dalam pelaksanaan pemanfaatannya. Kedua *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies* Vol. 2 No.2 oleh Natta Sanjaya dan Jumanah Tahun 2018 dengan judul “STRATEGI PENINGKATAN PAD MELALUI OPTIMALISASI PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018” (Natta Sanjaya dan Jumanah, 2018) yang menemukan bahwa strategi peningkatan PAD sudah berjalan dengan baik dengan adanya berbagai upaya oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten khususnya oleh Bapenda, BPKAD, dan OPD penghasil namun masih ada beberapa kendala dalam pemanfaatan BMD yang masih belum optimal pengelolaannya. Ketiga *Journal of Accounting Knowledge* Vol. 1 No. 1 oleh Juita Simatupang, Bob Mustafa dan Agus Widodo tahun 2023 dengan judul “OPTIMALISASI PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019-2021” (Juita Simatupang et al., 2023) yang menemukan bahwa yang pertama sampai saat ini semua aset tanah milik pemda masih dalam kriteria terpakai dan tidak ada tanah yang menganggur, kedua pendapatan sewa dari pemanfaatan aset tanah mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya dikarenakan terdapat peningkatan jumlah aset tanah yang disewakan, ketiga permasalahan dari pemanfaatan aset terjadi kesalahan pencatatan dan aset tanah yang dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima secara tidak resmi, dan keempat solusi dari hambatan tersebut dengan adanya pengamanan aset berupa penggusuran dan pemindahan pedagang kaki lima dan melaksanakan monitoring serta evaluasi. Keempat Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol. 3 No. 2 oleh Cika Rania Alya Putri dan Priyanto Susiloadi tahun 2023 dengan judul “OPTIMALISASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) KOTA SEMARANG DAN KABUPATEN PATI” (Cika Rania Alya Putri dan Priyanto

Susiloadi, 2023) yang menemukan bahwa dalam analisis 10 prinsip, baik BPKAD Kota Semarang maupun BPKAD Kabupaten Pati belum optimal dalam mengelola barang milik daerah, karena hanya memenuhi setengah dari 10 prinsip yang ada. Kelima *Journal of Economics & Business Sharia* Vol. 1 No. 2 oleh Ahmad Fajri, Ahmad Djalaluddin dan Siswanto Tahun 2018 dengan judul “PENGELOLAAN ASET TANAH DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG” (Ahmad Fajri et al., 2018) yang menemukan bahwa proses inventarisasi aset daerah berupa tanah merupakan pendataan lapangan dengan pengecekan atau verifikasi data dilapangan, pengecekan data meliputi penggunaan tanah, status tanah, luas tanah, dan pengguna tanah. Pendataan ini bertujuan untuk mendeskripsikan data yang sesuai dengan yang ada di lapangan agar terhindar dari kehilangan aset dan serta pendapatan daerah. Disisi lain, inventarisasi ini tidak bisa sesuai dengan harapan dan rencana dalam setiap periode, sebab dalam proses inventarisasi menemukan kendala yaitu objek inventarisasi banyak sedangkan tenaga terbatas sehingga memerlukan pihak ketiga yaitu konsultan sebagai tim inventarisasi.

Keenam *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol. 9 No. 1 oleh Feldha Shastiana Putri Tahun 2020 dengan judul “OPTIMALISASI PEMANFAATAN SEWA BARANG MILIK NEGARA UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK” (Feldha Shastiana Putri, 2020) yang menemukan bahwa pemanfaatan sewa barang milik negara untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Surabaya belum optimal. Ketujuh *Jurnal Lemhannas RI* Vol. 11 No.1 oleh K.P. Suharyono S. Hadiningrat Tahun 2023 dengan judul “OPTIMALISASI PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PEMBIAYAAN IBU KOTA NEGARA NUSANTARA” (K.P. Suharyono S. Hadiningrat , 2023) yang menemukan bahwa yang pertama peta potensi BMN di Kementerian/Lembaga tingkat pusat sekitar Rp. 1.123,6 T dan di IKN sekitar Rp. 2.209.33 M sangat berlebih untuk membiayai pembangunan IKN. Kedua optimalisasi pemanfaatan BMN dapat dilakukan dengan cara pinjam pakai, bangun guna serah atau bangun serah guna, kerjasama pemanfaatan dan kerja sama penyediaan infrasturktur serta sewa. Ketiga kontribusi pendapatan Provinsi Kalimantan Timur mencapai Rp 300-an T per tahun ke pemerintah pusat merupakan opsi pembiayaan pembangunan IKN. Kedelapan *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN* oleh Nyemas Hasfi, Martoyo dan Dwi Haryono Tahun 2013 dengan judul “PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH” (Nyemas Hasfi et al., 2013) yang menemukan bahwa pengelolaan BMD di DPPKA Kabupaten Sintang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, dalam proses pengelolaan BMD masih terdapat adanya kendala yakni kendala organisasi terkait dengan pemahaman dan aplikasi keputusan Bupati No. 2 Tahun 2008 tentang susunan organisasi perangkat daerah dan Perda No. 8 Tahun 2011 tentang pengelolaan barang daerah. Kesembilan *E-Jurnal Akuntansi* Vol. 32 No. 10 oleh Periansya, Farah Azmi dan Yuliana Sari Tahun 2022 dengan judul “MANAJEMAN BARANG MILIK DAERAH DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET PROVINSI X” (Periansya et al., 2022) yang menemukan bahwa hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa perencanaan memiliki dampak yang menguntungkan dan substansial bagi BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, optimalisasi pengelolaan aset. Identifikasi BMD berdampak negatif dan substansial terhadap optimalisasi pengelolaan aset BPKAD Provinsi Sumsel. Inventarisasi BMD tidak berpengaruh pada optimalisasi pengelolaan aset BPKAD di Provinsi Sumsel. Kesepuluh *Action Research Literate* Vol. 7 No. 9 oleh Suci Rahma Sari, Mediaty dan Nur Dwiana Sari Saudi Tahun 2023 dengan judul “ANALISIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA” (Suci Rahma Sari et al., 2023) yang menemukan bahwa kontribusi pemanfaatan sewa barang milik daerah terhadap pendapatan asli daerah masih kategori sangat kurang. Meskipun demikian

kontribusi pemanfaatan barang milik daerah terhadap pendapatan asli daerah terus mengalami perkembangan selama tahun 2018-2022.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di BPKAD Kota Makassar. Selain itu, ada perbedaan teori yang digunakan oleh peneliti yaitu dalam penelitian ini menggunakan teori Siregar (2021 : 518) yang memiliki 3 dimensi yang diantaranya Identifikasi aset, analisis pemanfaatan aset, sistem informasi manajemen aset (SIMA). Adapun persamaan dari penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan peneliti ialah sama-sama membahas terkait optimalisasi aset.

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini ada tiga yang diantaranya, untuk menganalisis dan mengetahui optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di BPKAD Kota Makassar, Untuk mengidentifikasi faktor penghambat optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di BPKAD Kota Makassar, Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan dalam optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di BPKAD Kota Makassar.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Menurut Creswell (2014:4) “Penelitian Kualitatif yaitu sebuah cara memahami dan menyelidiki seberapa penting individu/kelompok orang yang berbeda karena masalah sosial atau kemanusiaan.” Peneliti memilih untuk menggunakan jenis metode penelitian Deskriptif Kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena metode penelitian ini adalah metode yang paling tepat dalam menggambarkan suatu permasalahan secara sistematis dalam rangka menjelaskan informasi dan kondisi dari suatu permasalahan. Menurut Sugiyono (2017:137) “Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi secara mendalam melalui informan.” Menurut Simangunsong (2017:218) Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengandalkan panca indera dalam memperoleh data dalam memecahkan suatu permasalahan. Observasi yang dilakukan bisa berupa aktivitas, peristiwa, kejadian, kondisi, objek, suasana tertentu, seseorang. Observasi bertujuan untuk memperoleh data sesuai dengan situasi dan kondisi nyata yang terjadi dilapangan. Peneliti mengumpulkan data dengan metode wawancara dan observasi, kemudian dari sumber data ini peneliti menganalisis datanya sesuai dengan tahapan yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman dalam Suwandi (2008 : 209) yaitu ada tiga tahap mulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

3.1.1 Identifikasi Aset

Siregar (2021) mengemukakan pelaksanaan identifikasi aset merupakan tahapan pertama dalam optimalisasi suatu aset. Tahapan – tahapan tersebut meliputi :

1. Inventarisasi Fisik
2. Inventarisasi Legal
3. Penilaian Aset

Dimensi pertama pada teori Siregar (2021) meliputi tiga indikator diatas. Tiga indikator tersebut sangat berguna dalam pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengoptimalan pemanfaatan aset yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar.

Kepala Subbidang Penatausahaan Barang Daerah dan Status Pengguna Aset Daerah Bapak Muhammad Tahir A, S.Kom menjelaskan “Identifikasi aset di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar dilakukan dengan melakukan pencatatan atau inventarisasi aset. Kegiatan pencatatan dilakukan untuk mengetahui jumlah aset. Setelah dilakukan inventarisasi, selanjutnya dilakukan penilaian baik dari nilai kualitas aset ataupun nilai perolehan aset tersebut.”

Rekapitulasi Daftar Barang Milik Pemerintah Kota Makassar Periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2022

KOTA : MAKASSAR		PROVINSI : SULAWESI SELATAN		KEADAAN PER 01 Januari 2021		MUTASI PERUBAHAN SELAMA 01 Januari 2022 s/D 31 Desember 2022			
NO URUT	GOL	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA	BERKURANG		BERTAMBAH	
						JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA	JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	TANAH	4.640	24.994.716.419,873	9	635.007.814,820	207	1.212.409.753,320
2	2	2	PERALATAN DAN MESIN	231.465	1.622.496.472,508	196	8.205.484,285	36.910	284.695.874,435
		01	Alat Besar	900	154.194.379,908	-	-	10	13.788.546,000
		02	Alat Angkutan	5.654	562.462.059,834	65	7.330.484,625	781	65.742.490,858
		03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	1.947	26.284.943,129	1	10.000,000	184	1.399.154,958
		04	Alat Pertanian	327	1.661.286,108	-	-	243	5.793.777,491
		05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	152.003	310.152.804,463	49	295.251,500	28.283	78.667.492,245
		06	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	9.382	40.043.737,156	5	18.000,000	942	21.808.568,940
		07	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	30.054	244.058.726,219	16	101.840,000	650	13.846.030,562
		08	Alat Laboratorium	8.063	73.528.485,632	-	-	171	6.603.683,091
		09	Alat Persejajanaan	722	3.188.306,059	-	-	51	102.070,000
		10	Komputer	19.057	176.253.632,262	60	449.908,160	4.488	73.631.402,293
		11	Alat Eksplorasi	-	-	-	-	5	14.650,000
		12	Alat Pengeboran	-	-	-	-	-	-
		13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	4	136.605,000	-	-	-	-
		14	Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-	-	-
		15	Alat Keselamatan Kerja	2.038	25.074.478,478	-	-	374	2.243.578,970
		16	Alat Peraga	68	257.469,570	-	-	24	26.308,400
		17	Peralatan Proses/Produksi	23	400.178,000	-	-	30	64.000,000
		18	Rambu - Rambu	522	3.833.166,529	-	-	102	178.800,000
		19	Peralatan Olah Raga	701	966.214,161	-	-	572	785.320,627
3	3	3	GEDUNG DAN BANGUNAN	3.967	1.505.257.870,461	15	4.078.627,174	126	42.433.079,935
		01	Bangunan Gedung	3.645	1.447.539.905,825	14	3.426.787,174	106	38.638.679,800
		02	Monumen	23	3.841.331,086	-	-	-	90.853,500
		03	Bangunan Menara	8	1.944.920,000	-	-	-	-
		04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	291	51.931.713,550	1	651.840,000	20	3.703.546,635
4	4	4	JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN	26.107	6.106.212.308,449	1	134.347,993	552	127.662.097,177
		01	Jalan Dan Jembatan	8.781	5.399.814.199,907	1	134.347,993	411	101.894.856,750
		02	Bangunan Air	4.404	527.618.171,822	-	-	80	17.221.399,222
		03	Instalasi	12.315	159.014.683,810	-	-	20	8.065.078,705
		04	Jaringan	607	19.765.252,911	-	-	41	480.762,500
5	5	5	ASET TETAP LAINNYA	120.135	35.609.646,433	-	-	15.893	5.358.047,159
		01	Bahan Perpustakaan	102.204	19.067.647,549	-	-	15.499	2.240.467,759
		02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	8.466	8.676.156,076	-	-	394	3.117.579,400
		03	Hewan	-	-	-	-	-	-
		04	Biota Perairan	-	-	-	-	-	-

Tabel rekapitulasi daftar barang milik Pemerintah Kota Makassar yang menjadi salah satu contoh bentuk pencatatan atau inventarisasi Barang Milik Daerah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. Berdasarkan hasil wawancara dan contoh tersebut peneliti menyimpulkan bahwa proses identifikasi aset yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar memiliki tahapan yang sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Siregar terkait identifikasi aset.

3.1.1.1 Inventarisasi Fisik

Inventarisasi aset dilakukan sebagai bentuk kegiatan untuk mengetahui seberapa besar kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Inventarisasi yang telah dilakukan nantinya akan berguna bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mengambil langkah dalam mengoptimalkan penggunaan aset tersebut. Inventarisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar mencakup berbagai informasi yang penting untuk mengelola aset dengan efisien.

Berdasarkan rincian dari inventarisasi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar memiliki gambaran yang jelas tentang penggunaan dan kondisi setiap aset yang dimiliki oleh daerah. Hal ini sangat berguna untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan yang efektif terhadap aset-aset tersebut demi mendukung optimalnya pemanfaatan aset terutama pemanfaatan aset tetap tanah di Kota Makassar. Tercatat 280 aset tetap tanah yang dimanfaatkan dan 453 aset tetap tanah yang telah terinventarisasi dengan baik.

Pelaksanaan inventarisasi aset fisik dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Subbidang Penatausahaan Barang Daerah dan Status Pengguna Aset Daerah Bapak Muhammad Tahir A, S.Kom pada 13 Januari 2024 di ruang kerja. Beliau menjelaskan:

Sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa sensus barang milik daerah harus dilakukan setiap 5 tahun sekali untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris serta merekapitulasi barang milik pemerintah daerah. Sensus BMD oleh BPKAD Kota Makassar telah dilaksanakan sebanyak 4 kali namun menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 pada tahun 2008. Sensus barang milik daerah sudah dimulai dari tahun 2005. Dari kegiatan sensus barang milik daerah, disusun Buku Inventaris yang mencatat semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku inventaris ini mencakup data seperti lokasi, jenis/merk, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang, dan lain-lain. Keberadaan buku inventaris yang lengkap, teratur, dan berkelanjutan memiliki fungsi dan peran penting dalam pengendalian, pemanfaatan, pengamanan, dan pengawasan setiap barang; memaksimalkan penggunaan setiap barang sesuai dengan tujuan dan fungsinya; serta mendukung pelaksanaan tugas pemerintah.

Pelaksanaan inventarisasi fisik yang dilaksanakan oleh BPKAD Kota Makassar ialah inventarisasi yang dilakukan secara periodik 5 tahun sekali atau yang biasa disebut sensus Barang Milik Daerah. Sejak tahun 2005, BPKAD Kota Makassar telah melaksanakan sensus Barang dan menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 pada tahun 2008 sehingga terhitung sebanyak 4 kali dilaksanakannya sensus barang milik daerah. Kepala Subbidang Penatausahaan Barang Daerah dan Status Pengguna Aset Daerah Bapak Muhammad Tahir A, S.Kom menjelaskan:

Inventarisasi fisik itu kan proses yang penting dalam manajemen aset, dimana informasi tentang jumlah, lokasi, dan kondisi aset dicatat secara sistematis. Setelah pencatatan dilakukan, data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBAKDA) Kota Makassar, mungkin itu sama dengan Sistem Manajemen Aset (SIMASET).

Penggunaan aplikasi penatausahaan aset seperti SIMBAKDA Kota Makassar oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar memberikan banyak kemudahan dalam manajemen aset. Dengan aplikasi tersebut, proses pencatatan, pengelolaan,

dan pemantauan aset dapat dilakukan secara lebih efisien dan transparan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan inventarisasi fisik aset telah berjalan dengan optimal. BPKAD Kota Makassar rutin melakukan inventarisasi fisik secara periodik 5 tahun sekali yang disebut sensus Barang Milik Daerah. Pelaksanaan inventarisasi fisik ini disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3.1.1.2 Inventarisasi Legal

Inventarisasi legal aset daerah merupakan proses dokumentasi dan analisis yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memahami dan mengelola kepemilikan serta penguasaan semua aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut. Inventarisasi ini mencakup berbagai aspek, termasuk masalah hukum yang terkait dengan kepemilikan atau penguasaan aset, batas-batas penguasaan aset, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan aset daerah. Konteks inventarisasi legal aset daerah utamanya masalah yang berkaitan dengan sertifikat atau surat berharga sebagai bukti kepemilikan adalah hal yang sering terjadi. Aset tetap seperti tanah sangat penting untuk memiliki sertifikat kepemilikan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Alasannya ialah sertifikat tersebut merupakan bukti legal dan sah atas kepemilikan tanah tersebut berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data Sertifikasi Aset Pemanfaatan di Kota Makassar

No	Kriteria	Jumlah Bidang
1.	Total Tanah	4.938
2.	Bersertifikat	453
3.	Tidak Bersertifikat	4.485

Sumber : BPKAD Kota Makassar

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa masih sangat banyak permasalahan terkait dokumen kepemilikan aset di Kota Makassar. Dari 4938 aset yang ada, sebanyak 453 aset sudah bersertifikat, tetapi 4485 aset lainnya masih belum bersertifikat. Masalah terkait legalitas aset masih menjadi tugas besar terutama pada aset tetap tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Makassar, Drs.Muh. Dakhlan, M.Si, terdapat beberap hal yang dijelaskan:

Legalitas aset yang dimiliki oleh Kota Makassar, khususnya terkait aset tanah yang belum bersertifikat bisa menjadi masalah serius. Hal tersebut dikarenakan tanpa sertifikat kepemilikan yang sah, aset-aset tersebut rentan terhadap sengketa dan penggunaan yang tidak sah. Alasan utama dari banyaknya aset yang belum bersertifikat mungkin terletak pada kesulitan dalam proses administratif, terutama jika aset-aset tersebut berlokasi di daerah yang sulit diakses. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi juga bisa menjadi faktor penghambat dalam proses sertifikasi aset-aset tersebut.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan sertifikasi aset daerah di Kota Makassar belum mencapai target. Kendala utamanya adalah terkait dengan lokasi aset yang sulit dijangkau dan jauh dari kantor pertanahan. Meskipun demikian pernyataan tersebut juga menyiratkan bahwa terdapat upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar untuk memperbaiki situasi ini.

Berdasarkan informasi yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa inventarisasi legal aset milik Pemerintah Kota Makassar utamanya pada bidang aset tetap tanah masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu masalah utamanya adalah banyaknya aset yang belum memiliki sertifikat. Hal ini dapat menyebabkan ketidaklengkapan administrasi dan potensi risiko terkait kepemilikan aset. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengamanan aset termasuk lokasi aset yang jauh, tersebarnya lokasi kantor pertanahan, keterbatasan sumber daya manusia, dan anggaran yang terbatas. Semua ini dapat menghambat proses penerbitan sertifikat bagi aset tersebut. Ketika aset tidak memiliki sertifikat, hal itu berarti tidak ada bukti sah tentang kepemilikan aset. Ini dapat menyulitkan pengelolaan aset, termasuk dalam hal pemindahan kepemilikan, penjaminan, atau transaksi lainnya yang melibatkan aset tersebut.

3.1.1.3 Penilaian Aset

Penilaian aset merupakan langkah penting dalam pengelolaan aset suatu entitas, termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang bertanggung jawab atas penilaian aset milik Pemerintah Kota Makassar. Total nilai aset tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar sangatlah penting untuk mengetahui seberapa besar kekayaan daerah dalam bentuk aset tersebut. Namun, informasi tentang total nilai aset tanah biasanya tidak tersedia secara langsung. Proses penilaian aset mencakup beberapa faktor yang biasanya dipertimbangkan meliputi lokasi, kondisi fisik, nilai pasar, dan faktor-faktor lain yang relevan. Hasil dari penilaian ini memberikan gambaran tentang nilai aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar yang kemudian dapat digunakan untuk keperluan pengelolaan keuangan dan perencanaan jangka panjang. Berikut merupakan total nilai aset tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar.

Nilai Aset Tanah di Kota Makassar

No	Tahun	Nilai Perolehan
1	Per 31 Desember 2023	25.572.118.358.373,40
2	Per 31 Desember 2022	24.994.716.419.873,40

Sumber: BPKAD Kota Makassar

Peningkatan saldo tanah sebesar Rp577.401.938.500 antara 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023 menunjukkan angka positif dari hasil inventarisasi yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2023. Inventarisasi yang dilakukan pada tahun anggaran tersebut telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan nilai dari aset tana tersebut. Dalam hal ini, inventarisasi tersebut mungkin mencakup pencatatan tanah yang sebelumnya belum terdaftar atau diperbarui informasinya. Peningkatan saldo tanah bisa juga disebabkan oleh beberapa faktor lain, seperti penambahan tanah baru ke dalam kepemilikan pemerintah kota, peningkatan nilai tanah karena pembangunan atau peningkatan infrastruktur, atau bahkan kenaikan nilai pasar properti di wilayah tersebut.

Berdasarkan data di atas peneliti menyimpulkan terkait penilaian aset di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar telah melakukan langkah yang efektif untuk memperbarui dan meningkatkan pemahaman mereka tentang aset tanah mereka, yang secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya dan perencanaan perkotaan di masa depan.

3.1.2 Analisis Optimalisasi Pemanfaatan Aset

Optimisasi aset merupakan proses penting dalam pengelolaan aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan nilai dan manfaat dari aset yang dimiliki oleh suatu entitas, baik itu perusahaan, organisasi, atau pemerintah. Proses ini melibatkan identifikasi, pengelompokan,

dan penentuan penggunaan optimal dari berbagai aset yang dimiliki. Pada tahap identifikasi, semua aset yang dimiliki akan diidentifikasi dan dianalisis untuk mengetahui karakteristiknya, termasuk potensi fisik, lokasi, nilai, kuantitas, aspek hukum, dan potensi ekonominya. Setelah identifikasi dilakukan, aset-aset tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu, seperti penggunaan untuk tujuan operasional atau non-operasional.

Kepala Subbidang Penatausahaan Barang Daerah dan Status Pengguna Aset Daerah Bapak Muhammad Tahir A, S.Kom menjelaskan “analisis optimalisasi pemanfaatan aset dilakukan setelah melaksanakan proses identifikasi aset. Analisis pemanfaatan aset di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar dilakukan dengan pemilahan aset operasional dan non operasional serta melakukan proses pengoptimalan aset baik melalui sewa dan penjualan aset”.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa analisis optimalisasi pemanfaatan aset di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar melakukan pemilahan aset operasional dan non operasional serta melakukan proses pengoptimalan aset baik melalui sewa dan penjualan aset.

3.1.2.1 Pemilahan Aset Operasional dan Non Operasional

Pengelompokkan dan identifikasi aset pemerintah daerah ke dalam aset operasional dan non-operasional sangat penting dalam pelaksanaan pemanfaatan aset daerah. Aset operasional digunakan langsung untuk keperluan menjalankan tugas dan fungsi pemerintah, sementara aset non-operasional tidak digunakan untuk tujuan yang berakita dengan keperluan menjalankan tugas dan fungsi pemerintah. Aset non-operasional juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan lain, seperti meningkatkan pendapatan daerah. Dengan pemisahan ini, pemerintah daerah dapat lebih efisien dalam mengelola aset dan mengembangkan sumber pendapatan asli daerah. Berikut adalah data dari aset operasional dan aset non-operasional di Kota Makassar.

Jumlah Aset Operasional dan Aset Non-operasional di Kota Makassar

No	Bentuk Aset	Jumlah
1	Aset Tetap Tanah Operasional	4.658
2	Aset Tetap Tanah Non-Operasional	280
	Total	4.938

Sumber: BPKAD Kota Makassar

Tabel memperlihatkan jumlah keseluruhan aset tanah yang dimiliki oleh Kota Makassar sebanyak 4.938 terdiri dari aset yang masih beroperasi sebanyak 4.658 dan aset sudah tidak beroperasi sebanyak 280. Aset yang masih beroperasi jumlahnya jauh lebih banyak dikarenakan dasar tujuan utama aset pemerintah untuk penunjang penyelenggaraan pemerintahan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Subbidang Perencanaan Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah Bapak H. Laode ABD Rahman Subuh, SH:

Kalau bicara tentang penggunaan aset, pertama kali kita perlu mengetahui apa yang kita lakukan dengan aset itu? Aset yang kita punya ini tujuan utamanya untuk mendukung tuisi, meyenggarakan pemerintahan, dan *public service*. Kalau semua tugas dan fungsi serta administrasi sudah bagus, kita bisa buat aset ini untuk menunjang pendapatan daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas maka pengelolaan aset oleh pemerintah daerah harus didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan publik. Prioritas utama haruslah untuk memastikan bahwa aset tersebut digunakan secara efisien dan efektif untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas.

Pemerintah daerah seharusnya mengelola aset mereka dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan mengutamakan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini termasuk dalam menjaga infrastruktur dasar, seperti jalan, air bersih, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya.

Berdasarkan dari data yang peneliti peroleh, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengklasifikasian aset operasional dan aset non operasional di Kota Makassar dilakukan dengan mengutamakan manfaat kepentingan operasional terlebih dulu, khususnya untuk mendukung manajemen pemerintahan Kota Makassar. Setelah dari kebutuhan itu terpenuhi, barulah aset itu dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut. Oleh karena itu, menurut pendekatan ini pemisahan aset operasional dan aset non operasional dapat dilakukan secara optimal oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar dengan optimal.

3.1.2.2 Analisis Pemanfaatan Aset

Pemanfaatan barang milik daerah menjadi satu dari komponen meningkatkan pendapatan asli daerah, selain dari pajak dan retribusi. Dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah harus berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya diatur didalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa pihak, Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Makassar Bapak Rahmatullah, S.STP., M.Si, mengatakan : “aset adalah satu dari berbagai sumber daya yang kita punya untuk bisa meningkatkan PAD, apalagi waktu masanya *covid-19* PAD daerahnya kita terjadi penurunan yang signifikan apalagi pada sektor pajak dan retribusi.”

Optimalisasi pemanfaatan aset daerah menjadi satu solusi pemerintahan Kota Makassar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang disebut pendapatan primer, karena pendapatan asli daerah ini yang berupa pajak dan retribusi pajak semakin berkurang apalagi disaat pandemi *covid-19*. Oleh karenanya, aset-aset yang dimiliki daerah harus dioptimalkan secara maksimal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Makassar Bapak Rahmatullah, S.STP., M.Si menjelaskan: “pendapatan yang kita hasilkan dari pemanfaatan aset ini adalah dengan cara menyewakannya. Aset biasa disewakan ke pihak ketiga untuk menjadi tempat tinggal. Usaha, atupun untuk perkebunan dan pertanian.”

Pelaksanaan pendayagunaan aset pada otoritas pengelolaan aset dan keuangan daerah Kota Makassar dilakukan melalui kerja sama sewa guna usaha, BGS/BSG, dan penyediaan infrastruktur. Namun, bentuk pemanfaatan yang paling umum digunakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah sewa. Bentuk penggunaan tersebut sesuai dengan pedoman Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Daerah. Berikut ini adalah *standard operating procedure* (SOP) pelaksanaan penyewaan aset daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dapat disimpulkan, pemanfaatan barang milik daerah (BMD), terutama melalui kontrak sewa merupakan salah satu solusi yang dapat dioptimalkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. Namun, pelaksanaan kontrak sewa seringkali mengalami kendala dan tidak berjalan lancar, dengan penyewa yang tidak mematuhi peraturan dan perjanjian yang telah ditetapkan. Pemanfaatan Barang Milik Daerah belum dimanfaatkan secara optimal, yang tercermin dari masih

banyaknya aset yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Beberapa faktor yang menjadi penyebabnya antara lain:

1. Aset yang Rusak: Aset yang rusak atau dalam kondisi buruk menjadi kendala utama dalam pemanfaatan BMD. Diperlukan investasi perbaikan atau pemeliharaan agar aset tersebut dapat digunakan secara efektif.
2. Lokasi yang Tidak Strategis: Lokasi aset yang tidak strategis atau kurang diminati juga dapat menjadi hambatan dalam pemanfaatan BMD. Diperlukan strategi yang lebih baik untuk memilih lokasi yang memiliki potensi pasar yang lebih baik.
3. Kurangnya Anggaran: Kurangnya anggaran untuk perbaikan, pemeliharaan, atau promosi pemanfaatan aset juga menjadi faktor yang membatasi pemanfaatan BMD secara optimal. Diperlukan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pemanfaatan aset secara efektif.

Mengatasi kendala-kendala tersebut dan mengoptimalkan pemanfaatan BMD maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar dapat mempertimbangkan langkah-langkah seperti:

1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi aset yang dimiliki, termasuk identifikasi aset yang rusak dan membutuhkan perbaikan.
2. Mengembangkan strategi pemanfaatan yang lebih efektif, termasuk promosi pemanfaatan aset dan penyesuaian harga sewa yang kompetitif.
3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan penyewa untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang peraturan dan perjanjian yang berlaku.
4. Memperkuat pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kontrak sewa untuk mencegah penyimpangan atau pelanggaran.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemanfaatan BMD dapat dioptimalkan dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah serta pembangunan Kota Makassar secara keseluruhan.

3.1.3 Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA)

Sistem Informasi Manajemen Aset atau disebut SIMA adalah sebuah alat yang berguna untuk mengoptimalkan serta membuat pengelolaan aset daerah lebih efektif dan efisien. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Makassar Bapak Rahmatullah, S.STP., M.Si menjelaskan bahwa “Didalam pengelolaan aset yang lebih efektif dan efisien kami di BPKAD menggunakan sistem informasi manajemen aset dengan nama SIMBAKDA yang merupakan aplikasi yang membantu dalam pengelolaan aset kota Makassar.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan sistem informasi manajemen aset (SIMA) dalam suatu instansi akan memudahkan pengelolaan aset sehingga pengelolaan aset dapat berjalan dengan lancar mulai dari perencanaan hingga pemantauan dan pengendalian aset. Jika sistem informasi manajemen aset ini berfungsi dengan baik, maka kinerja pengelolaan aset dapat berjalan lebih lancar.

3.1.3.1 Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBAKDA)

Penggunaan aplikasi sistem informasi manajemen aset atau disebut sistem informasi manajemen barang dan aset kekayaan daerah Kota Makassar atau disingkat SIMBAKDA Kota Makassar dapat mengatasi permasalahan yang ada dan memperlancar kinerja dalam program pengelolaan aset daerah. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Makassar Bapak Rahmatullah, S.STP., M.Si menjelaskan penggunaan

SIMBAKDA di BPKAD Kota Makassar sebagai berikut : “pendaftaran dalam proses pencatatan dan pengelolaan properti BPKAD Kota Makassar menggunakan sistem informasi manajemen aset yang namanya SIMBAKDA. Jadi aplikasi ini itu berbasis web yang isinya berkaitan dengan semua data yang berkaitan dengan harta berupa aset.”

Aplikasi SIMBAKDA Kota Makassar ini merupakan sistem informasi yang memiliki basis web atau internet. Website ini digunakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar dalam proses pengelolaan aset khususnya pada penatausahaan aset. Adanya bentuk aplikasi seperti ini memberikan kemudahan dalam penatausahaan aset yang dilakukan oleh BPKAD serta aplikasi ini berisi tentang segala informasi terkait dengan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Dalam aplikasi ini memberikan seluruh dari informasi yang berkaitan dengan aset milik pemerintah daerah Kota Makassar sehingga informasi aset dapat diakses dengan mudah. Selanjutnya akan direncanakan seluruh data aset yang dimiliki Kota Makassar akan bisa diakses melalui aplikasi ini. Menurut Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah Bapak Muhammad Tahir A, S.Kom melihat situasi penggunaan aset daerah diruang kerja terkait pemakaian aplikasi SIMBAKDA mengatakan: “aplikasi SIMBAKDA ini sangat memberikan guna dalam mengimplementasikan subsektor manajemen aset ini dalam pengelolaan aset. Bahkan, saat ini aplikasi sejenis ini telah banyak digunakan disetiap pemerintah daerah baik kabupaten bahkan provinsi.”

Penggunaan aplikasi SIMBAKDA dinilai sangat memberikan manfaat dalam menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi lembaga pengelola keuangan dan aset daerah dalam pengelolaan aset. Sampai dengan saat ini SIMBAKDA tidak hanya digunakan di Kota Makassar saja, namun juga diadopsi oleh beberapa kabupaten dan bahkan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Menurut Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Makassar Bapak Rahmatullah, S.STP., M.Si menjelaskan :”Dalam beberapa tahun terakhir ini kita telah memperoleh cap WTP sebanyak 5 kali, artinya apa? Optimal atau tidaknya aplikasi ini dapat dilihat dari perolehan WTP-nya. Jika suatu daerah bilang aplikasinya sudah optimal tapi tidak WTP berarti belum optimal dan belum teruji transparansinya.”

Pemerintah Kota Makassar sudah berhasil memperoleh beberapa kali WTP. BPK RI yang memberikan cap WTP ini dapat menjadi indikator aplikasi SIMBAKDA Kota Makassar ini telah berjalan dengan optimal dan teruji dikarenakan transparansi dan akuntabilitas daerah tersebut telah teruji. Dengan aplikasi SIMBAKDA ini, transparansi dan akuntabilitas dari setiap aset yang dimiliki Kota Makassar telah dianggap cukup baik sehingga dapat diberikan WTP.

Berdasarkan dari pembahasan yang telah peneliti jelaskan merujuk kepada sistem informasi manajemen aset (SIMA). Sistem Informasi Manajemen Aset ini sebagai alat optimalisasi pengelolaan aset pada otoritas yang dimaksud pemerintah dengan aplikasinya yang bernama SIMBAKDA yang digunakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar ini telah dinilai sudah memadai bahkan dikatakan bagus. Dikarenakan aplikasi ini telah memberikan kemudahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam pengelolaan aset di Kota Makassar, selain dari pada itu aplikasi SIMBAKDA ini juga diterapkan di beberapa pemerintah kabupaten bahkan pemerintah provinsi. Oleh karena itu aplikasi ini dinilai dapat berfungsi dengan baik dan digunakan secara maksimal dan sukses khususnya dalam bidang registrasi pencatatan dan pengelolaan aset.

3.1.4 Faktor Penghambat Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar

Optimalisasi aset yang dimiliki oleh Kota Makassar yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam hal ini masih menga-lamai beberapa kendala dan menjadi penghambat seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Makassar Bapak Rahmatullah, S.STP., M.Si “Kita di BPKAD ini masih mengalami beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam pengelolaan aset, antara lain itu masih kurangnya SDM dan juga beberapa aset yang lokasinya belum strategis.” Dari penjelasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Aset, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat dua faktor yang menjadi penghambat yang menjadikan Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah masih belum bisa melaksanakan optimalisasi dengan baik.

3.1.4.1 Kuantitas Sumber Daya Manusia Terbatas

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengoptimalkan kinerjanya, terutama terkait dengan keterbatasan jumlah pegawai. Kendala sumber daya manusia dalam pelaksanaan penatausahaan dan sertifikasi aset dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap pemanfaatan aset.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Makassar: “Aset Kota Makassar terutama aset tetap tanah itu banyak, sehingga kita terkadang cukup kewalahan karena personil terbatas”.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa kendala dalam sumber daya manusia memang dapat menjadi hal yang signifikan dalam pemanfaatan aset terutama dalam hal penatausahaan dan sertifikasi aset. Keterbatasan jumlah atau kualitas staf yang bertanggung jawab atas tugas-tugas tersebut dapat menghambat proses yang optimal.

3.1.4.2 Lokasi Aset Yang Tidak Strategis

Lokasi aset yang jauh dan tidak strategis dapat menjadi kendala serius dalam memanfaatkan aset tersebut. Tidak hanya dalam hal pelaksanaan pemanfaatan aset saja, namun hal ini juga menjadi kendala bagi tim Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar dalam melaksanakan inventarisasi fisik aset. Yang mana hasil inventarisasi dan penilaian aset yang kurang optimal akan berdampak pula kepada pelaksanaan pemanfaatan aset.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subbidang Perencanaan Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah, di ruang kerja beliau menjelaskan : “ Seperti yang disampaikan Bapak Kepala Bidang Aset yang menjelaskan bahwa kurangnya personil, kita juga kewalahan akibat lokasi aset terlalu jauh sehingga pelaksanaan pengecekan fisik aset tidak bisa dilaksanakan secara cepat”.Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat menyimpulkan bahwa akibat dari lokasi aset yang jauh tidak hanya menjadi hambatan dan kendala pada bagian pemanfaatan aset saja, tetapi akan berpengaruh juga pada inventarisasi fisik aset tersebut .

3.1.5 Upaya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Dalam Optimalisasi Barang Milik Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar tentu saja tidak semata-mata hanya ditinggalkan begitu saja, dengan adanya hambatan yang dijelaskan pada halaman sebelumnya Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Makassar menjelaskan bahwa

Dari hambatan yang dihadapi tentu saja kami tidak berdiam diri untuk tidak melakukan apa-apa, kami menggunakan SIMBAKDA agar membantu para pegawai dalam melakukan pengelolaan aset yang dimana dengan kurangnya anggota SIMBAKDA ini sangat membantu kami dalam mengelola aset tersebut, belum lagi dengan aset yang memiliki lokasi kurang strategis kami pun sangat terbantu untuk memantau aset tersebut dari aplikasi ini.

Berdasarkan dari penjelasan yang diberikan, peneliti menyimpulkan bahwa dengan menggunakan aplikasi SIMBAKDA ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar dalam menutupi kekurangan yang ada di organisasi yaitu dengan kekurangan Sumber Daya Manusia dan kurang strategisnya lokasi dari beberapa aset yang dimiliki.

3.1.5.1 Menggunakan Sistem Informasi SIMBAKDA Kota Makassar

Penggunaan sistem informasi pengelolaan aset seperti SIMBAKDA Makassar adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, terutama mengingat jumlah pegawai yang terbatas. Penggunaan aplikasi SIMBAKDA Kota Makassar yang dikembangkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar membuktikan manfaatnya dalam memudahkan penatausahaan dan monitoring aset.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Makassar menjelaskan “Selain dari menggunakan Aplikasi SIMBAKDA dengan maksimal, Saat ini kami juga masih mencoba mengusahakan adanya penambahan pegawai agar pelaksanaan tugas di organisasi ini bisa lebih optimal.” Dari penjelasan ini peneliti menyimpulkan bahwa tindakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar untuk membangun sumber daya manusia juga merupakan langkah yang sangat penting dalam mendukung penggunaan sistem informasi penatausahaan aset yang telah dibuat.

3.1.5.2 Memperbaiki Aset yang Rusak

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar untuk melakukan inventarisasi dan penilaian aset, serta tindakan selanjutnya terhadap aset yang rusak, merupakan praktik yang penting dalam pengelolaan aset yang efektif. Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Makassar menjelaskan bahwa “selain kami mengupayakan secara maksimal untuk tetap memaksimalkan aset yang lokasinya kurang strategis, disisi lain kami terus berupaya memperbaiki aset-aset yang telah rusak agar lebih bernilai dan lebih menghasilkan.” Peneliti menyimpulkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar telah berupaya maksimal memanfaatkan aset yang lokasinya masih kurang strategis serta perbaikan aset yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di BPKAD Kota Makassar peneliti dapat menyimpulkan bahwa optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah yang dikelola oleh BPKAD Kota Makassar masih belum optimal dan temuan ini sejalan dengan temuan Cika Rania Alya Putri dan Priyanto Susiloadi yang mengatakan bahwa dalam analisis 10 prinsip pada BPKAD Kota Semarang dan BPKAD Kabupaten Pati belum optimal dalam mengelola barang milik daerah karena belum memenuhi segala prinsip yang ada. Begitu juga

dengan yang ditemukan oleh Feldha Shastiana Putri yang mengatakan bahwa pemanfaatan sewa barang milik negara untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Surabaya belum optimal.

Sejalan dengan yang ditemukan oleh Ahmad Fajri, Ahmad Djalaluddin dan Siswanto yang mengatakan inventarisasi ini tidak bisa sesuai dengan harapan dan rencana dalam setiap periode dikarenakan dalam proses inventarisasi ditemukan kendala yaitu objek inventarisasi banyak sedangkan tenaga terbatas sehingga memerlukan pihak ketiga. Begitu juga yang peneliti temukan bahwa penghambat optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Makassar dikarenakan faktor sumber daya manusia yang terbatas dan lokasi aset yang tidak strategis. Adapun upaya yang dilakukan BPKAD dalam optimalisasi barang milik daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah ialah dengan cara membuat sebuah sistem informasi manajemen aset yang bernama sistem informasi manajemen barang milik daerah (SIMBAKDA) makassar yang berguna untuk memudahkan kinerja dalam penatausahaan aset. Memperbaiki aset yang rusak untuk menarik pihak ketiga untuk mau melakukan sewa aset. Serta memperbaiki aset yang masih rusak serta mengupayakan adanya perhatian khusus yang diberikan untuk aset yang memiliki lokasi yang kurang strategis dalam optimalisasinya.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang dilakukan, maka peneliti dengan ini bisa menarik sebuah kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu, pertama disimpulkan bahwa Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar masih belum optimal. Hal tersebut karena dari 6 (enam) indikator yang ada, sebanyak 4 (empat) indikator sudah berjalan dengan optimal dan 2 (dua) indikator masih belum optimal. Indikator yang sudah optimal yaitu inventarisasi fisik, penilaian aset, pemilahan aset operasional dan non operasional dan Informasi Manajemen Aset (SIMA). Sedangkan Indikator yang belum optimal yaitu inventarisasi legal dan analisis pemanfaatan aset. Kedua Faktor penghambat optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar terdapat dua faktor yaitu:

- a. Sumber daya manusia yang terbatas
Masih terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sehingga membuat para pegawai kewalahan dalam mengelola aset yang secara maksimal.
- b. Lokasi aset yang tidak strategis
Beberapa aset yang dimiliki Kota Makassar yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar memiliki lokasi yang kurang strategis sehingga dalam pemanfaatannya menjadi terhambat dan masih belum dapat dioptimalisasikan dengan maksimal dikarenakan lokasi yang tidak strategis tersebut serta masih adanya aset yang perlu perbaikan.

Ketiga upaya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam Optimalisasi barang Milik Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah:

- a. Membuat suatu Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) yang bernama Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBAKDA) Makassar yang berguna untuk memudahkan kinerja dalam penatausahaan aset. Memperbaiki aset yang rusak untuk menarik pihak ketiga untuk mau melakukan sewa aset.
- b. Memperbaiki aset yang masih rusak serta mengupayakan adanya perhatian khusus yang diberikan untuk aset yang memiliki lokasi yang kurang strategis dalam optimalisasinya.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini masuk dalam kategori terbilang cepat sehingga dalam pelaksanaannya peneliti harus memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik agar memperoleh hasil yang maksimal.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari bahwa temuan awal dari penelitian ini masih perlu adanya tindak lanjut, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilaksanakan penelitian lanjutan pada lokasi serupa atau bahkan dengan ruang lingkup yang lebih besar terkait dengan penelitian tentang optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di BPKAD Kota Makassar untuk menemukan hasil yang lebih mendalam. Besar harapan dari peneliti bahwa hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan evaluasi pemerintahan daerah agar kedepan kebijakan yang akan diambil akan lebih tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih peneliti tujukan kepada Pemerintah Daerah Kota Makassar khususnya Kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian yang terkait dengan optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di BPKAD Kota Makassar. Terkhusus peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga yang tiada hentinya mendoakan dan memberikan *support* kepada peneliti dan juga terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung terlaksananya penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fajri, Ahmad Djalaluddin dan Siswanto. (2018). Pengelolaan Aset Tanah Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. *Journal of Economics & Business Sharia Vol. 1 No. 2*.
- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cika Rania Alya Putri dan Priyanto Susiloadi. (2023). Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kota Semarang dan Kabupaten Pati. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol. 3 No. 2*.
- Cresswell, J. (2014). *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Feijar dan Budi Priyono. (2023). Pengelolaan Aset Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Depok. *Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship Vol. 5 No. 2*.
- Feldha Shastiana Putri. (2020). Optimalisasi Pemanfaatan Sewa Barang Milik Negara Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 9 No. 1*.
- Juita Simatupang, Bob Mustafa dan Agus Widodo. (2023). Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2021. *Journal of Accounting Knowledge Vol. 1 No. 1*.
- K.P. Suharyono S. Hadiningrat . (2023). Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Pembiayaan Ibu Kota Negara Nusantara . *Jurnal Lemhannas RI Vol. 11 No. 1*.

- Natta Sanjaya dan Jumanah. (2018). Strategi Peningkatan PAD Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018. *Journal Of Indonesian Public Administration and Governance Studies Vol. 2 No. 2*.
- Nyemas Hasfi, Martoyo dan Dwi Haryono . (2013). Pengelolaan Barang Milik Daerah . *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN* .
- Periansya, Farah Azmi dan Yuliana Sari . (2022). Manajemen Barang Milik Daerah dan Optimalisasi Pengelolaan Aset Provinsi X. *E-Jurnal Akuntansi Vol. 32 No. 10*.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan* . Bandung: Alfabeta.
- Siregar, Doli D. (2021). *Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional Dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO'S pada Era Globalisasi & Otonomi Daerah* . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suci Rahma Sari, Mediaty dan Nur Dwiana Sari Saudi . (2023). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba. *Action Research Literate Vol. 7 No. 9*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* . Bandung: CV. Alfabeta.

